

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA
MENDISTRIBUSIKAN/MENTRANSMISIKAN MEMBUAT DAPAT
DIAKSESNYA INFORMASI/DOKUMEN ELEKTRONIK YANG
MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN/
PENCEMARAN NAMA BAIK
(STUDI PUTUSAN NO.1498K/PID.SUS/2015)**

S K R I P S I

Oleh:

I PUTU TRESNA WIADNYA

201310117016



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi:

Penegakan Hukum Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Mendistribusikan/Mentrasmisikan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan/Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan No.1498K/Pid.Sus/2015)

Nama: I Putu Tresna Wiadnya

NPM: 201310117016

Fakultas/ Program Studi: Hukum / Ilmu Hukum

MENYETUJUI,

Dekan

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah,S.H,MH.

NIP 01804338

Pembimbing I

Yuspan Zalhuku,S.H.,MH.
NIP : 010803029

Pembimbing II

Suyanto Sidik, SH.,MH.
NIP : 010803024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul skripsi:

Penegakan Hukum Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Mendistribusikan/Mentrasmisikan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan/Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan No.1498K/Pid.Sus/2015)

Nama:

I Putu Tresna Wiadnya

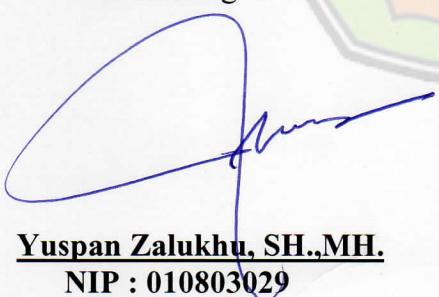
NPM:

201310117016

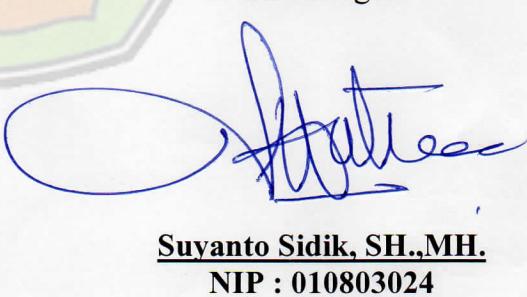
Fakultas/ program studi: Hukum / Ilmu Hukum



Pembimbing I


Yuspan Zalukhu, SH.,MH.
NIP : 010803029

Pembimbing II


Suyanto Sidik, SH.,MH.
NIP : 010803024

LEMBAR PENGESAHAN

Judul skripsi:

Penegakan Hukum Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Mendistribusikan/Mentrasmisikan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan/Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan No.1498K/Pid.Sus/2015)

Nama Mahasiswa:

I Putu Tresna Wiadnya

Nomor Pokok Mahasiswa:

201310117016

Program Studi/Fakultas:

Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal lulus Ujian Skripsi:

20 Juli 2018

Ketua Tim Penguji:

Sri Wahyuni, SH., MH

NIP. 1504117

Penguji I:

Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si

NIP. 1712304

Penguji II:

Gatot Efrianto, SH., MH

NIP. 010909020

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Elfirda Ade Putri, SH., MH
NIP. 011512043

Penegakan Hukum..., I Putu, Fakultas Hukum 2018
Dr. H. Erwin Owan Hermansyah,S.H,MH.
NIP. 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa:
Skripsi/Tesis yang berjudul:

PNEGAKAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA
MENDISTRIBUSIKAN/MENTRASNISIKAN MEMBUAT DAPAT
DIAKSESNYA INFORMASI/DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI
MUATAN PENGHINAAN/ PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI PUTUSAN
NO.1498K/PID.SUS/2015)

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Skripsi/Tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 20 Juli 2018

Yang membuat pernyataan



Penegakan Hukum... | I Putu, Fakultas Hukum 2018

I PUTU TRESNA WIADNYA

201310117016

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai aktivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I PUTU TRESNA WIADNYA
NPM : 201310117016
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Penegakan Hukum Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana
Mendistribusikan/Mentransmisikan Membuat Dapat Diaksesnya
Informasi/Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan
Penghinaan/Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan No.1498K/Pid.Sus/2015)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada Tanggal : 20 Juli 2018



(I PUTU TRESNA WIADNYA)

ABSTRAK

I Putu Tresna Wiadnya, 201310117016. Skripsi. Penegakan Hukum Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Mendistribusikan/Mentranmisikan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan/ Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan No.1498K/Pid.Sus/2015)

Terhadap penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui internet melalui media sosial ini diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan yang dibahas mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, Putusan Perkara Nomor 1498K/Pid.Sus/2015, yang membatalkan Putusan bebas di Pengadilan Negeri terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, telah mencerminkan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mendapatkan kesimpulan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Perkara Nomor 1498K/Pid.Sus/2015, bahwa Putusan Majelis Hakim Nomor 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst menyatakan terhadap terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Berakibat Putusan Majelis Hakim Nomor 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst memberikan putusan bebas. Putusan Perkara Nomor 1498K/Pid.Sus/2015, yang membatalkan Putusan bebas di Pengadilan Negeri Nomor 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst, menyatakan terhadap terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Menurut penulis, Putusan Perkara Nomor 1498K/Pid.Sus/2015 belum mencerminkan penegakan hukum dalam hal penjatuhan sanksi pidana percobaan yang diberikan kepada terdakwa. Peran aparat penegak hukum, salah satunya adalah Hakim dapat melakukan upaya penanggulangan dengan menjatuhkan sanksi pidana yang memberikan efek jera serta agar masyarakat lainnya takut untuk melakukan tindak pidana tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik

Kata Kunci: Penegakan hukum, putusan bebas, pencemaran nama baik

ABSTRACT

I Putu Tresna Wiadnya, 201310117016. Thesis. Law Enforcement Against the Crime-Free Decision Distribute / Transmit Make Accessible Electronic Information / Document Containing Insult / Defamation (Study Decision No.1498K / Pid.Sus / 2015)

Against defamation or defamatory committed through the internet through social media is regulated in the provisions of Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 Year 2016 on Amendment to Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions. The issues discussed concerning the judges of the Supreme Court of Justice received the appeal of the Public Prosecutor in a criminal act deliberately distributing accessible electronic documents / documents containing defamation charges, Decision Case Number 1498K / Pid.Sus / 2015, which canceled the Court's Decision free The State against perpetrators of criminal acts by deliberately distributing accessible electronic documents / documents that have defamation content, has reflected the rule of law. This research uses normative legal research method to get the conclusion of the consideration of the judge of the Supreme Court accepts the appeal of the Public Prosecutor, that the Decision of the Panel of Judges in Case Number 1824 / Pid.Sus / 2013 / PN.Jkt.Pst stating the application of the element has insult and / or defamatory in Article 27 paragraph (3) of ITE is not proven.filled in the hearing. In this regard, the Panel of Judges' considerations are not in accordance with the legal facts contained in the proceedings. Decision Case Number 1498K / Pid.Sus / 2015, which cancels a free Decision in the District Court against the perpetrator of a crime deliberately distributing accessible electronic documents / documents that have contents of defamation or defamatory yet the creation of law enforcement on the grounds of the imposition of criminal sanctions for 2 (two) years ends not in accordance with the purpose of crime. This, based on legal facts, many criminal acts of crime by deliberately distributing accessible information / electronic documents that have contents of defamation or defamatory in the community. The role of law enforcement officers, one of which is the Judge can make efforts to overcome by imposing criminal sanctions that provide deterrent effect and that other people are afraid to commit criminal acts of crime by deliberately distributing accessible information / electronic documents that have contents of defamation or defamatory.

Keywords: Law enforcement, free judgment, defamation

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat, hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, Penegakan Hukum Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Mendistribusikan /Mentrasmisikan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan/Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan No.1498K/Pid.Sus/2015). Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Bapak I Made Wiraya dan Ibu Ni Made Suardi tercinta, yang telah memberikan motivasi secara moril maupun materil yang amat berarti bagi penulis, dan penulis juga mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan hingga skripsi ini selesai.

Kepada Bapak Yuspan Zalhuku, SH., MH., Dosen Pembimbing Materi dalam penulisan skripsi ini. Bapak Suyanto Sidik, SH., MH., Dosen Pembimbing Teknis dalam penulisan skripsi ini.

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr.Dr. Ir. H. Erwin Hermansyah Soetoto, SE, SH, MH, MM, MM Inv, RFA, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Segenap Dosen dan Sekertariat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.

Bekasi, 20 Juli 2018

I PUTU TRESNA WIADNYA

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah	6
1.2.1. Identifikasi Masalah	6
1.2.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Manfaat Penelitian	7
1.4. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran	8
1.4.1. Kerangka Teori	8
1.4.2. Kerangka Konseptual	10
1.4.3. Kerangka Pemikiran	13
1.5. Metode Penelitian	14
1.6. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Tindak Pidana	17
2.2. Pengertian Pencemaran Nama Baik	18
2.3. Pengertian dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi	

Penegakan Hukum	20
2.4. Pengertian dan Bentuk-bentuk Pelaku	24
2.5. Pengertian Tindak Pidana Dengan Sengaja Mendistribusikan Dapat Diaksesnya Informasi/ Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik	25
2.6. Unsur-unsur Tindak Pidana Dengan Sengaja Mendistribusikan Dapat Diaksesnya Informasi/ Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik	29
2.7. Pengaturan Putusan Bebas.....	33
2.8. Upaya Hukum.....	34
2.9. Sanksi Pidana Percobaan.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN	
3.1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Menerima Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 1498K/Pid.Sus/2015	36
3.2. Putusan Perkara Nomor 1498K/Pid.Sus/2015, yang membantalkan Putusan Bebas di Pengadilan Negeri Nomor 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst Dikaitkan Penegakan Hukum Pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE	44
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
4.1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Menerima Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 1498K/Pid.Sus/2015	55
4.2. Putusan Perkara Nomor 1498K/Pid.Sus/2015,	

yang membatalkan Putusan Bebas di Pengadilan Negeri Nomor 1824/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst Dikaitkan Penegakan Hukum Pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE	65
---	----

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	79
5.2. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

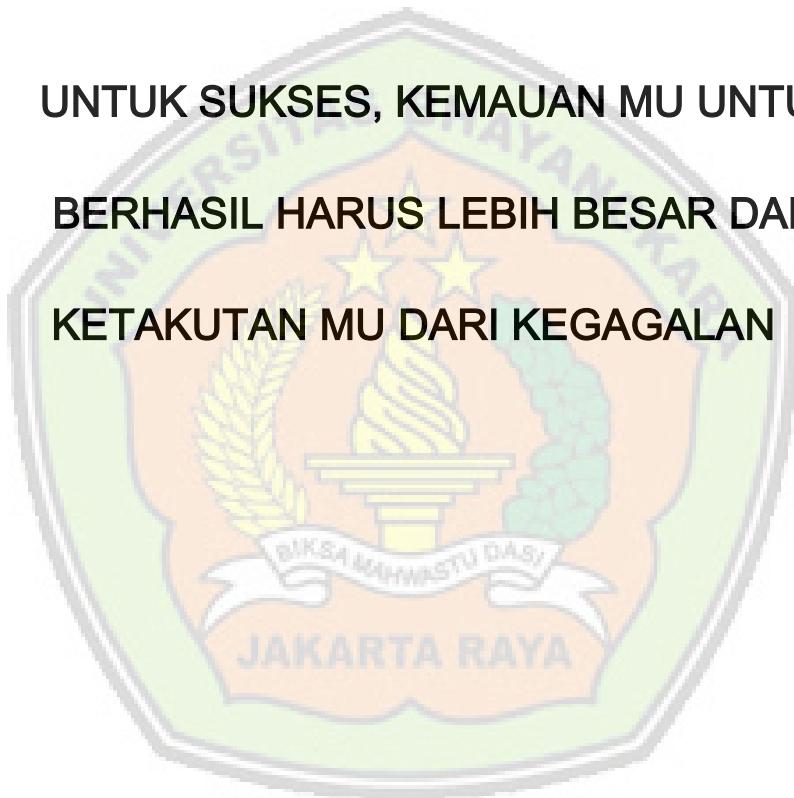
LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



M O T T O

UNTUK SUKSES, KEMAUAN MU UNTUK
BERHASIL HARUS LEBIH BESAR DARI
KETAKUTAN MU DARI KEGAGALAN



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	: Arti dan Kepanjangan
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-undang
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
PID.SUS	: Pidana Khusus
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Pengadilan Tinggi
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
JKT	: Jakarta
PT	: Perusahaan Terbatas
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KCP	: Kantor Cabang Pusat
CV	: Commanditaire Venootschap
SMS	: Short Message Service
DIRUT	: Direktur Utama
Jo	: Juncto
Ir	: insinyur